



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN
2019



(0742) 7351069



www.dishub.tanjabarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof Dr Sri Sudewi MS Telp & Fax. (0742) 21972
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 050/ /Dishub/2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan dan Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah telah disahkan oleh kepala Daerah dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 585/Kep-bup/Bappeda/2017 tentang pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000M(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah penanggungjawab rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dalam kurun waktu 2017 - 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, memuat Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.

Ditetapkan di Tanjung Jabung Barat
Pada tanggal 2018.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. H. ENDANG SURYA,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Barat;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat;
3. Kabag Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat;

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, telah dapat diselesaikan

Rencana Kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah periode 11 (satu) tahun. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4).

Penyusunan Rencana Kerja ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019, sehingga target penetapan RKA/DPA- SKPD Tahun 2019 dipenuhi sesuai jadwal yang disepakati antara pihak Bupati Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, mengingat banyak kendala dan keterbatasan dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, atas segala kekurangsempurnaan dalam penyusunan naskah ini mohon kiranya dimaafkan dan mengharapkan adanya tanggapan, saran dan umpan balik yang konstruktif, sehingga segala kekurangan dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya dapat lebih baik.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyelesaian rencana kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, anugrah dan hidayah-Nya. Akhirul-kalam, mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
A. Sasaran dan Capaian Indikator	12
B. Permasalahan dan Solusi	17
C. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah Antisipasi	18
D. Strategi Pemecahan Masalah	21
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	22
2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Kewenangan Dinas Perhubungan	22
a. Tugas Pokok Dan Fungsi	22
b. Sumber Daya Aparatur	24

c. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	25
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	25
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	27
2.6 Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan	32
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran	34
3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017	36
BAB IV KESIMPULAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Kegiatan Tahun 2017	9
Tabel 2.2 Realisasi Indikator Program Prioritas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017	11
Tabel 2.3 Capaian Indikator Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Berdasarkan RPJMD Dan Renstra	13
Tabel 2.4 Realisasi Sasaran Strategis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017	15
Tabel 2.5 Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Transportasi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017	20
Tabel 2.6 Target Dan Realisasi PAD	22
Tabel 2.7 SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017	24
Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal Renja	29
Tabel 3.1 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019	36
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020 Sumber Dana APBN Kabupaten	37
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2019 Sumber Dana APBN Kementerian Perhubungan RI	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra OPD dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Renstra.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021. Tahun Anggaran 2019 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2016 - 2021, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada sub agenda pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global;
- c. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.

Dari sub agenda nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi yang terkait langsung sektor transportasi antara lain :

- a) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
- b) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
- c) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
- d) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
- e) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
- f) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.

Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan menjadi salah satu sub agenda prioritas nasional dengan sasaran (1) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (2) Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Jalan Perkotaan yang diukur dengan kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar minimal 20 km/jam (3) meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000M(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah penanggungjawab rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dalam kurun waktu 2017 – 2021;
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Tujuan penyusunan Renja:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2019 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

- c. Terwujudnya pencapaian visi dan misi perhubungan yang mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi kabupaten tanjung jabung barat;
- d. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan perhubungan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
- e. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- f. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- g. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang renja OPD, proses penyusunan renja OPD, keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/ L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 2016-2021

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD atau SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dianalisis disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021, Dinas Perhubungan memiliki visi: "Terwujudnya transportasi antar MODA yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berbasis teknologi untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat". Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang terintegritas.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan, 9 (sembilan) program, dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2017, telah disusun dengan rencana kerja Tahun 2017. Dalam perjalanannya telah dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2017 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017.

Pada akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mepedomani dan menganalisa hasil dari realisasi anggaran, penyempurnaan indikator kinerja sehingga Renstra dan IKU.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 sampai dengan tahun 2017 Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2017 telah terealisasi sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Hasil Kegiatan Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Anggaran JUMLAH TOTAL	Realisasi Keuangan	Capaian % Keuangan	Capaian % Kinerja
1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran					
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000	3.300.000	73,33	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	209.000.000	155.510.008	74,41	90,00
3	Penyediaan jasa jaminan milik daerah	37,200,000	30.759.065	82,69	100,00
4	Penyediaan jasa adm. Keuangan	105.820.000	97.541.250	92,18	95,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.027.476	7.773.500	96,84	95,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	50.545.200	35.029.740	69,30	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.600.000	19.950.705	57,66	95,83
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.610.100	3.565.100	77,30	100,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	4.200.000	1.380.000	32,86	100,00
11	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	211.984.860	208.592.394	98,40	100,00
JUMLAH		676.487.636	569.401.762	84,17	100,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	149.200.00	146.151.400	97,96	100,00
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	81.200.000	80.815.000	99,53	100,00
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	82.000.000	50.685.000	97,47	100,00
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	452.380.000	390.145.135	98,35	100,00
16	Pemeliharaan rutin berkala/peralatan gedung kantor	128.500.000	112.908.854	87,86	100,00
JUMLAH		893.280.000	780.705.389	84,17	100,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur					

17	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	91.070.000	90.211.000	99,06	100,00
	JUMLAH	91.070.000	90.211.000	99,06	100,00
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan					
18	Penyusunan Laporan Kegiatan Operasional	108.900.000	96.195.376	88,33	78,33
	JUMLAH	108.900.000	96.195.376	88,33	78,33
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					
19	Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Kantor Perhubungan	568.000.000	553.947.896	97,53	75,00
	JUMLAH	568.000.000	553.947.896	97,53	75,00
6. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ					
20	Rehabilitas / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	108.000.000	105.815.914	97,98	100,00
	JUMLAH	108.000.000	105.815.914	97,98	100,00
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					
21	Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Terminal	530.480.000	517.128.000	82,15	80,00
22	Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan Penyebmngan	228.000.000	227.233.920	99,66	100,00
23	Posko Ramadhan , Lebaran, Tahun Baru	158.000.000	157.715.000	97,54	100,00
24	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	212.000.000	174.150.000	82,15	60,00
25	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan Pelabuhan Sungai Dan Pelabuhan Penyebmngan	197.330.000	155.623.800	78,86	80
	JUMLAH	1.325.810.000	1.232.150.720	92,94	84,00

	8. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Bermotor				
26	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	125.000.000	122.195.800	97,76	100,00
27	Uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	68.000.000	62.953.000	92,58	100,00
	JUMLAH	193.000.000	185.148.800	95,93	100,00
	9. Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas				
28	Operasional Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	664.600.000	639.448.200	96,22	100,00
	JUMLAH	664.600.000	639.448.200	96,22	100,00
	JUMLAH TOTAL	4.629.147.636	4.253.025.057	91,87	97,24

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tanjab Barat Tahun 2017

Prosentase penggunaan anggaran Tahun 2017 dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.629.147.636,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 4.253.025.057,00 atau sebesar 91,87 %. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 376.122.579,00 atau sebesar 8,13 % dari keseluruhan anggaran Belanja Langsung (BL) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kegiatan.

Pencapaian kinerja 2 (dua) sasaran dan pelaksanaan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Tahun 2017 dari output maupun outcome yang dihasilkan dapat mengakselerasi pencapaian indikator yang telah ditetapkan dari 2 (dua) sasaran yang ditargetkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikatakan berhasil dengan semua indikator dapat dicapai dengan memuaskan.

Tabel 2.2 Realisasi Indikator Program Prioritas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017

No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)	Target RPJMD Tahun 2017	Realisasi RPJMD Tahun 2017	Keterangan
1	Program Pembangunan Prasarana Dan	Meningkatnya kualitas halte dan dermaga sungai	21	13	2	5	Jumlah halte sungai yang terbangun

	Fasilitas Perhubungan	untuk kelancaran transportasi					
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ	Meningkatnya Kualitas prasarana transportasi	13	13	2	8	Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana fasilitas perhubungan yaitu halte sungai dan pelabuhan/d ermaga sungai
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya jaminan pelayanan dan kenyamanan sarana angkutan	16	21	27	25	Jumlah lokasi untuk memberikan pelayanan
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan frekuensi pengendalian ketertiban lalu lintas	22	15	25	41	Jumlah pelanggaran lalu lintas dilihat dari berita acara pemeriksaan
5	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya jumlah kendaraan yang lulus uji	1.044	1.450	1.376	1.376	Jumlah unit kendaraan yang lulus uji

A. Sasaran dan Capaian Indikator Sasaran

Sasaran dan Indikator Sasaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dan target serta realisasinya dapat dilihat dari 2 tipe yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur Transportasi
2. Meningkatnya Layanan Pengguna Transportasi

Hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan adalah meningkatnya kelancaran dan kenyamanan ber lalu lintas dengan terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan khususnya pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berupa Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengamanan jalan, Marka Jalan maka peningkatan fasilitas lalu lintas di jalan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan dan dalam sosialisasi pendidikan masyarakat untuk menuju tertib lalu lintas.

Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2017 yang diukur dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
Berdasarkan RPJMD dan RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Pembangunan Insfratruktur Transportasi	- Tersedianya laporan kegiatan operasional	80 buku	80 buku	100
		- Jumlah Dokumen yang di susun			
		a. Tersedianya Dokumen perencanaan halte sungai	11 dokumen	11 dokumen	100
		- tersedianya fasilitas dermaga dan halte	8 unit	8 unit	100
		- pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	1 paket	1 paket	100
2.	Meningkatnya layanan pengguna transportasi	Capaian layanan pengguna transportasi			
		a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	31 unit	31 unit	100
		b. Kegiatan pengawasan, pengamanan Kawasan pelabuhan laut, sungai dan Penyebrangan	12 bulan	12 bulan	100
		c. Kegiatan Forum lalu lintas Angkutan Jalan dan keselamatan LLAJ	4 kegiatan	4 kegiatan	100
		d. Kegiatan Penciptaan keamanan dan kenyamanan Penumpang dilingkungan Terminal	12 bulan	12 bulan	100
		e. Kegiatan Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyebrangan.	12 Bulan	12 Bulan	100
		f. Kegiatan Posko pengamanan Hari - Hari besar Nasional daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
		g. Kegiatan Operasional Pengawasan, Pengendalian dan Pengamana Lalu Lintas	12 bulan	12 bulan	100
		h. Uji kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.376 unit	1.376 unit	100

**TABEL 2.4 REALISASI SASARAN STRATEGIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT
TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN TARGET DALAM PERSENTASE (%)	TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN TARGET KEUANGAN PERSENTASE (%)
1.	Pembangunan infrastruktur transportasi	Capaian infrastruktur transportasi	a. Tersedianya laporan kegiatan operasional	80 Buku	80 Buku	Rp 108,900,000	Rp 96,195,376	88.33
			b. Tersedianya dokumen perencanaan halte sungai	11 Dokumen	11 Dokumen	Rp 568,000,000	Rp 553,947,896	97.53
			c. Tersedianya fasilitas pelabuhan ro-ro yaitu pembuatan pos jaga ro-ro	8 Unit	8 Unit	Rp 108,000,000	Rp 105,815,914	97.98
			d. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Unit	1 Unit	Rp 125,000,000	Rp 122,195,800	97.76
2.	Meningkatnya layanan pengguna transportasi	Capaian layanan pengguna transportasi			100.00	2,541,693,920	2,396,307,175	94.22
		a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	31 Unit	31 Unit	100.00	Rp 452,380,000	Rp 390,145,135	86.24
		b. Kegiatan Pengawasan, Pengamanan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan Penyeberangan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	Rp 228,000,000	Rp 227,233,920	99.66
		c. Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan keselamatan LLAJ	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00	Rp 212,000,000	Rp 174,150,000	82.15
		d. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	12 Bulan	12 Bulan	100.00	Rp 530,480,000	Rp 517,428,000	97.54

	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan penunjang di lingkungan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	Rp	228,233,920	Rp	227,233,920	99.56
	f. Kegiatan Posko Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional Daerah	6	Kegiatan	6	Kegiatan	100.00	Rp	158,000,000	Rp	157,715,000	99.82
	g. Kegiatan Operasional Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	12	Bulan	12	Bulan	100.00	Rp	664,600,000	Rp	639,448,200	96.22
	h. Uji Kelalkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.376	Unit	1.376	Unit	100.00	Rp	68,000,000	Rp	62,953,000	92.58
JUMLAH						100.00	Rp.	3,451,593,920	Rp	3,274,462,161	94.81

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa berdasarkan capaian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2017, semua sasaran yang dirumuskan tercapai walaupun belum seoptimal mungkin. Hal ini diharapkan dapat mendorong seluruh seluruh komponen

Dari 28 kegiatan dan 9 program yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan pencapaian kinerja berdasarkan realisasi dan realisasi fisik.

B. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang awalnya dinas perhubungan, informatika dan komunikasi menjadi dinas perhubungan, sehingga anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) di bidang informatika dan komunikasi tidak dapat direalisasikan dan menjadi silpa, yang berpengaruh terhadap rendahnya serapan anggaran dinas perhubungan
2. Adanya selisih perhitungan antara harga barang / jasa dalam perencanaan yang tertuang dalam DPA dengan harga barang / jasa yang dibayarkan pada saat pelaksana kegiatan.
3. Adanya efisiensi di belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah di Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4. Adanya efisiensi pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Solusi dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan data dan informasi dari berbagai sumber baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Peningkatan koordinasi pelaksanaan angkutan penumpang umum, seperti kegiatan sosialisasi dan anjuran kepada pengusaha angkutan/operator
3. Pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran seefektif mungkin
4. Perlu dilaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan mengingat program E-enforcement merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan

c. Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah Antisipasi

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja yang mempengaruhi pembangunan maupun program kegiatan. Namun kami menyadari bahwa segala upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih baik sekecil apapun selalu mendapatkan hambatan dan pelaksanaannya tidak sesempurna sesuai dengan harapan. Dalam pencapaian Sasaran Tahun 2018, Terdapat beberapa kendala dan hambatan antara lain :

1. Peraturan di bidang Perhubungan, baik darat dan laut memerlukan kesamaan penafsiran untuk pelaksanaannya di segala tingkatan. Selain itu juga diperlukan harmonisasi peraturan perundangan bidang Perhubungan khususnya dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang kadang-kadang dilapangan menimbulkan kendala tersendiri untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah hukum di belakang hari.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah tentu memerlukan manajemen tersendiri untuk dapat menjalankan roda organisasi di Bidang/UPTD dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. diperlukan kebutuhan komposisi di Bidang Darat dan Laut juga yang memiliki kualifikasi di bidang perhubungan mengingat dua moda tersebut terdapat pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan sesuai yang ditentukan.
3. Pengalokasian Anggaran Belum Sepenuhnya Berdasarkan Pencapaian Indikator Kinerja. Kendala yang umumnya dihadapi oleh instansi adalah keterbatasan anggaran, sedangkan indikator yang harus dicapai berdasarkan RPJMD dan Renstra telah tertulis secara kuantitatif. Dengan adanya target atau angka/digit tertentu pada indikator tertentu, juga telah dapat ditentukan berapa Rupiah alokasi biaya yang diutuhkan untuk mencapainya. Namun indikator yang telah ditetapkan belum berbanding lurus dengan pengalokasian anggaran pada suatu program / kegiatan yang telah ditentukan, pada priode Rencana Tahunan yang telah disusun setiap tahunnya. Sehingga masih perlu peningkatan efektifitas dan efisien pengalokasian anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra. Hal ini memerlukan politik anggaran atau kebijakan anggaran yang kuat dari berbagai pihak setiap tahunnya, indikator mana yang akan dicapai dengan anggaran APBD yang terbatas pada setiap tahunnya. Atau kebijakan yang kuat dalam menentukan skala prioritas yang akan dicapai karena masa jabatan Bupati selama 5 (lima) tahun.

4. Pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang besar, hal ini juga dapat menjadi kendala. Biaya yang cukup besar yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, memerlukan jalan keluar yang sistematis dan terukur, baik secara peraturan maupun penganggaran. Dalam tahun 2018 pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung jabung Barat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan bidang perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, sedangkan penanganan tugas pokok sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan lainnya belum maksimal dilaksanakan, mengingat penanganan bidang perhubungan memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta semua stakeholder. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pada tahun tahun mendatang Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung jabung Barat mampu melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perhubungan dan menjadikan dinas yang dapat mendukung dalam rangka pembangunan daerah kabupaten tanjung jabung barat khususnya pembangunan di sektor perhubungan.

Adapun kendala dan hambatan yang mengemuka secara umum dalam pembangunan bidang Perhubungan antara lain adalah :

1. Peningkatan Fasilitas Lalu Lintas jalan

a. Kendala dan hambatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 Menyebutkan bahwa Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, bahwa setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas Umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a) Rambu Lalu Lintas;
- b) Marka Jalan;
- c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d) Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan;
- e) Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;

- f) Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) diselenggarakan oleh :

- a) Pemerintah untuk jalan nasional;
- b) Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c) Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan;
- d) Kabupaten/kota dan jalan desa; atau

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana fasilitas lalu lintas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat fisik yaitu pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas di jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebutuhan prasarana fasilitas lalu lintas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini terdapat pada program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas lalu Lintas Angkutan jalan (LLAJ).

Dalam program ini, terdapat permasalahan yaitu fasilitas lalu lintas jalan yang ada dan telah terpasang masih menunjukkan kekurangan-kekurangan dari sisi kuantitas. Disisi lain fasilitas lalu lintas yang terpasang merupakan barang/benda yang sangat rentan terhadap kehilangan pencurian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dilakukan adalah pihak Dinas Perhubungan akan mengusulkan secara bertahap kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan pada ruas jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya dan mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk menyempurnakan standar teknis fasilitas lalu lintas yang mempunyai nilai ekonomis rendah sehingga mengurangi resiko terjadinya pencurian. Usaha lain adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya fasilitas perhubungan untuk meningkatkan keselamatan penggunaan jalan.

Tabel 2.5 Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Transportasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017

No	Uraian	Satuan	Kondisi Existing
1	Rambu Darat		
	- Rambu Darat	178 unit	
	- Rambu Type F	14 unit	
	- Rambu Mini	13 unit	

	- RPJJ	9 unit	
	- Pagar Temporer	40 unit	
	- Warning Light	12 unit	
	- Guadrail	2 Paket	
	- Deliniator	280 buah	
2	Rambu Sungai	7 buah	

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan dan pendidikan masyarakat yang secara berkesinambungan untuk meningkatkan keselamatan penggunaan jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya untuk mengusulkan kembali pada setiap tahun anggaran untuk dapat memenuhi kekurangan-kekurangan dan memelihara fasilitas lalu lintas jalan.

2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

a. Kendala dan hambatan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta untuk meningkatkan kinerja aparat dinas, tentunya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran menjadi salah satu hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Terdapat sarana dan prasarana perkantoran yang saat ini dirasakan belum dapat mendukung dan meningkatkan (walupun tidak sampai pada tahapan menghambat) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsiserta Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya untuk mengusulkan pada tahun berikutnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kekurangan tersebut serta tetap mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dengan melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkelanjutan.

d. Strategi Pemecahan Masalah

Dari uraian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung barat sebagaimana tersebut diatas diperlukan upaya dan strategi secara bersama untuk meningkatkan pelayanan bidang Perhubungan.

Dengan adanya kendala tersebut, maka strategi yang diterapkan dalam upaya pemecahannya adalah dengan menggunakan strategi skala prioritas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan bahwa tujuan pencapaian visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai sasaran utama masih tetap dapat pelaksana dengan sebaik-baiknya.

Selain itu diperlukan strategi terobosan yang terencana dan bertahap agar tujuan akhir dari pelayanan bidang Perhubungan berupa penyelenggaraan perhubungan yang mengembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menangani perhubungan. Adapun target dan realisasi pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi PAD Tahun 2017

No	Uraian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Retribusi Pelayanan Parkir	70.000.000	39.766.000	56,81
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	165.000.000	161.881.000	98,11
3	Retribusi Terminal	70.000.000	72.254.000	103,22
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Pelayanan Kepelabuhan)	70.000.000	125.926.500	179,90
	Jumlah	375.000.000	399.827.500	106,62

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Tanjab Barat, 2017

2.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) dan Peraturan Bupati

Tanjung Jabung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 63)

Adapun uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategis dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dilingkungan dinas;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyebrangan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan unit pelayanan teknis dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilingkup tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat mengacu Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 63); terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris :
 - Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perhubungan Darat;
 - Seksi Lalu Lintas Jalan dan Angkutan;
 - Seksi Sarana dan Prasarana;
 - Seksi Operasional dan Keselamatan;
4. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - Seksi Keselamatan Pelayaran;
 - Seksi Angkutan Kepelabuhan;
 - Seksi Sarana dan Prasarana;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Disamping itu, Dinas Perhubungan memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari UPTD Terminal, UPTD Pelabuhan Sungai, UPTD Parkir.

b. Sumber Daya Aparatur

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan TKK yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) PNS dan 84 (delapan puluh empat) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :			
	- Eselon II	1	1	-
	- Eselon III	4	4	-
	- Eselon IV	14	11	3
	-Non Eselon	24	21	3
	Jumlah	43	37	6
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
	- SD	1	1	0
	- SMP	1	1	0
	- SMA	24	22	2
	- D II	1	1	0
	- D III	3	2	1
	- D IV	1	1	0
	- S.1	9	6	3
	- S.2	2	2	0
	Jumlah	43	39	7
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status :			
	- PNS	43	37	6
	- Kontrak	84	77	7
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur :			
	- Diklat PIM II	0	0	0
	- Diklat PIM III	1	1	0
	- Diklat PIM IV	6	6	0

c. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam upaya mendukung pencaaian visi pemerintah kabupaten tanjung barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Sejalan dengan Visi Bupati Tanjung Jabung Barat, Visi Dinas Perhubungan adalah :

“Terwujudnya transportasi antar MODA yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berbasis teknologi untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat”.

Misi :

Misi adalah suatu pernyataan komprehensif tentang tugas pokok dan fungsi organisasi, serta sasaran yang hendak dicapai dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian misi sangat diperlukan dalam organisasi untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar setiap kegiatan/ produk organisasi selalu mengarah kepada pencapaian Visi.

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang terintegritas.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan

sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Kemajuan di bidang Komunikasi dan Informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah:

- a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjab Barat;
- b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:

1. Urusan Perhubungan

- a. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;
- b. Fasilitas pengatur dan pengamanan lalu lintas masih terbatas;
- c. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
- d. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
- e. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten;
- f. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
- g. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang Perhubungan:
- h. Belum meratanya sarana dan prasarana.

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk mewujudkan visi misi tersebut adalah :

- a. Adanya visi dan misi Dinas.
- b. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
- d. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang bekreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.
- e. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait. Demi terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat maju, adil, makmur, bermartabat dan berkualitas sebagaimana tertera pada visi pemerintah kabupaten tahun 2016-2021. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada tahun 2017 mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya.
2. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ.
3. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan teknis, administrasi di bidang perhubungan.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman Perencanaan Pembangunan dengan membandingkan program dari pemerintah kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program untuk dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan kota.

Rancangan awal untuk RKPD Tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, Proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja daerah untuk 2019 sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah
2. Dukungan RPJMN 2016 – 2021 dan RKP 2018;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan ;

4. Bantuan dari Pemerintah Pusat Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
5. Pendukung untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
6. Pendukung implementasi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Program/kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rancangan Awal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitive untuk diajukan menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja, Yang selanjutnya Menjadi Rancangan Rencana kerja yang dirumuskan dari usulan-usulan sebagai berikut :

1. Usulan Musrenbang dari kecamatan
2. Ide Kegiatan
3. Pokok-pokok Pikiran DPRD
4. Proposal yang disampaikan oleh Kecamatan Ke OPD terkait.

Yang selanjutnya Dinas Perhubungan akan menghimpun dan menelaah serta memproses setiap usulan-usulan yang disampaikan oleh Kecamatan untuk diproses dan dibahas dalam Rapat Forum OPD.

Rapat Forum OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan yang dihadiri oleh OPD terkait, Para Camat dan Bappeda yang hasil dari rapat Forum OPD adalah Review Rancangan Renja Dinas Perhubungan kabupaten Tanjung jabung Barat terhadap Usulan-Usulan dari setiap Kecamatan dapat terlihat pada table dibawah ini :

TABEL 2.8
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNGPINANG BARAT

RANCANGAN AWAL RENCANA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	URUSAN PERHUBUNGAN	4	3	5	6	1	URUSAN PERHUBUNGAN	4	3	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				884,050,000	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				884,050,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Jabung Barat	Administrasi perkantoran	1200 Ltr	5,400,000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Jabung Barat	Administrasi perkantoran	1200 Ltr	5,400,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Jabung Barat	Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bin	330,000,000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Jabung Barat	Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bin	330,000,000
3	Penyediaan Jasa Jaminan Berang Milk Danah	Tanjung Jabung Barat	Terpeliharanya prasana transportasi	100%	55,000,000	3	Penyediaan Jasa Jaminan Berang Milk Danah	Tanjung Jabung Barat	Terpeliharanya prasana transportasi	100%	55,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Jabung Barat	Pelayanan administrasi keuangan	100%	120,000,000	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Jabung Barat	Pelayanan administrasi keuangan	100%	120,000,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Jabung Barat	Peaksanaan perkantoran	100%	12,500,000	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Jabung Barat	Peaksanaan perkantoran	100%	12,500,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Jabung Barat	Peaksanaan perkantoran	100%	50,000,000	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Jabung Barat	Peaksanaan perkantoran	100%	50,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tanjung Jabung Barat	Pelayanan administrasi	100%	33,150,000	7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tanjung Jabung Barat	Pelayanan administrasi	100%	33,150,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjung Jabung Barat	Peaksanaan perkantoran	100%	5,000,000	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjung Jabung Barat	Peaksanaan perkantoran	100%	5,000,000
9	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundug-undugan	Tanjung Jabung Barat	Pelayanan administrasi	100 Org	7,000,000	9	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundug-undugan	Tanjung Jabung Barat	Pelayanan administrasi	100 Org	7,000,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Jabung Barat	Pelayanan perkantoran	60 Pkt	6,000,000	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Jabung Barat	Pelayanan perkantoran	60 Pkt	6,000,000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tanjung Jabung Barat	Pejelasan dinas dalam dan luar daerah	1 Pkt	240,000,000	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tanjung Jabung Barat	Pejelasan dinas dalam dan luar daerah	1 Pkt	240,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,127,560,000	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,127,560,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tanjung Jabung Barat	Terleaksananya kegiatan operasional	1 Unit	20,000,000	1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tanjung Jabung Barat	Terleaksananya kegiatan operasional	1 Unit	20,000,000
2	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Tanjung Jabung Barat	Terleaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	20 Unit	103,560,000	2	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Tanjung Jabung Barat	Terleaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	20 Unit	103,560,000
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tanjung Jabung Barat	Peralatan gedung kantor	6 Unit	64,000,000	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tanjung Jabung Barat	Peralatan gedung kantor	6 Unit	64,000,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tanjung Jabung Barat	Gedung kantor dalam kondisi	25 Unit	380,000,000	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tanjung Jabung Barat	Gedung kantor dalam kondisi	25 Unit	380,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Jabung Barat	Sarana transportasi terpelihara	25 Unit	500,000,000	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Jabung Barat	Sarana transportasi terpelihara	25 Unit	500,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung Kantor	Tanjung Jabung Barat	Sarana transportasi terpelihara	25 Unit	80,000,000	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung Kantor	Tanjung Jabung Barat	Sarana transportasi terpelihara	25 Unit	80,000,000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				130,000,000	III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				130,000,000
1	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Peningkatannya	Tanjung Jabung Barat	Disiplin Pegawai	132 Org	130,000,000	1	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Peningkatannya	Tanjung Jabung Barat	Disiplin Pegawai	132 Org	130,000,000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				60,000,000	IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				60,000,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tanjung Jabung Barat	Disiplin Pegawai	2 Orang	60,000,000	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tanjung Jabung Barat	Disiplin Pegawai	2 Orang	60,000,000

V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja			120,000,000						
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Khtsar Realisasi Kinerja	Tanjung Jabung Barat	Kegiatan Laporan Operasional Dinas Perhubungan Terlaksana	100 Buku	120,000,000	1	1	Kegiatan Laporan Operasional Dinas Perhubungan Terlaksana	100 Buku	120,000,000
VI	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			280,000,000						
1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tanjung Jabung Barat	perencanaan pembangunan sarana dan prasarana	2 Dak	180,000,000		1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	2 Dak	180,000,000
2	Penyusunan kebijakan norma standar dan prosedur bidang perhubungan	Tanjung Jabung Barat	dokumen kebijakan norma standar dan prosedur kebijakan dan prosedur kebijakan	1 Dak	100,000,000		2	Penyusunan kebijakan norma standar dan prosedur bidang perhubungan	1 Dak	100,000,000
VII	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAISDP			400,000,000						
1	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelebaran menjadi baik	Tanjung Jabung Barat	Terminal/Pelebaran menjadi baik	13 Unit	400,000,000		1	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelebaran menjadi baik	13 Unit	400,000,000
VIII	Terampil/Reliabel/Kelelahan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			1,893,000,000						
1	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilindungi kembali dan pakir	Tanjung Jabung Barat	Terselektifnya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilindungi kembali	2 Dak	780,000,000		1	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilindungi kembali dan pakir	2 Dak	780,000,000
2	Pengawasan kawasan pelebaran, laut, sungai dan penyeberangan	Tanjung Jabung Barat	terawasi kawasan pelebaran, laut, sungai dan penyeberangan	2 Lok	288,000,000		2	Pengawasan kawasan pelebaran, laut, sungai dan penyeberangan	2 Lok	288,000,000
3	Sosialisasi penyuluhan lalu lintas angkutan sungai	Tanjung Jabung Barat	Peningkatan pengetahuan lalu lintas angkutan sungai	-	-		3	Sosialisasi penyuluhan lalu lintas angkutan sungai	-	-
4	Forum lalu lintas angkutan jalan	Tanjung Jabung Barat	rapat-rapat pembahasan forum LLAJ	4 Kali	250,000,000		4	Forum lalu lintas angkutan jalan	4 Kali	250,000,000
5	Kegiatan Poako pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	Tanjung Jabung Barat	Terselektifnya pelayanan pokok ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT perhubungan	8 Keg	180,000,000		5	Kegiatan Poako pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	8 Keg	180,000,000
6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilindungi pejalan sungai dan pelebaran danakbrt	Tanjung Jabung Barat	Terselektifnya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilindungi kembali	2Bn	280,000,000		6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilindungi pejalan sungai dan pelebaran danakbrt	2Bn	280,000,000
7	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/uru mudik awak kendaraan angkutan umum	Tanjung Jabung Barat	terpilih sopir/uru mudik awak kendaraan angkutan umum	1 Org	45,000,000		7	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/uru mudik awak kendaraan angkutan umum	1 Org	45,000,000
8	Sosialisasi penyuluhan lalu lintas angkutan	Tanjung Jabung Barat	kegiatan penyuluhan lalu lintas angkutan	3 Lokasi	80,000,000		8	Sosialisasi penyuluhan lalu lintas angkutan	3 Lokasi	80,000,000
IX	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			1,010,000,000						
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Deret	Tanjung Jabung Barat	terpasangnya rambu lalu lintas	30 Unit	250,000,000		1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	30 Unit	250,000,000
		Tanjung Jabung Barat		7 Unit	-				7 Unit	-

Berasal dari table diatas, dapat dilihat bahwa dari hasil review usulan dalam Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbeda dengan Rancangan Awal RENJA Sehingga terdapat Usulan baru dalam Perumusan Rancangan Rencana Kerja Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai Usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui Forum OPD akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Bidang Sarana Dan Prasarana Perhubungan. Pada umumnya kebutuhan masyarakat yang tertampung pada Musrenbang telah Ditelaah dan Diproses Oleh Dinas Perhubungan yang selanjutnya akan diproses kembali pada Forum Lalu lintas OPD. Beberapa Usulan yang telah diterima berupa :

1. Perencanaan Peningkatan Dermaga kayu Menjadi Halte Sungai
2. Pengadaan Marka / Rambu-rambu Jalan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas

perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan dan angkutan umum perkotaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2019 adalah :

- ✓ Terwujudnya peningkatan kualitas sistem transportasi dan pelayanan angkutan;
- Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 sebagai berikut:

1. Urusan Perhubungan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 1. Penyusun Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 1. Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
 2. Penyusunan Kebiasaan, Norma, Standar, Dan Prosedur Bidang Perhubungan
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan
8. Program Peningkatan Pelayanan dan Angkutan
 1. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan Terminal Dan Parkir
 2. Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru, Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
 3. Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai Dan Penyeberangan
 4. Sosialisasi Penyuluhan Lalu Lintas Angkutan Sungai

5. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
6. Kegiatan Posko Pengamanan Hari – Hari Besar Nasional Dan Daerah
7. Sosialisasi Penyuluhan Lalu Lintas Angkutan Darat
8. Kegiatan Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pelabuhan Sungai Dan Pelabuhan Penyeberangan
9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 1. Pengadaan Rambu – Rambu Lalu Lintas
 2. Operasional Pengawasan Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Bermotor
 1. Uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Program Rutin terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 20 kegiatan.
- b. Program Wajib terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 14 kegiatan.

Dapat di totalkan keseluruhan Setiap OPD terdiri dari program rutin dan program wajib adalah 10 program, terdiri 34 kegiatan.

3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Tabel di bawah

Tabel 3.1
Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Target (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	
	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	60.000.000
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000
2	Retribusi Jasa Usaha	
3	Retribusi Terminal	50.000.000
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	45.000.000
	Jumlah	255.000.000

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020
Sumber Dana APBD Kabupaten

Kode	SKPD	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
01		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01 07		URUSAN PERHUBUNGAN				7.809,610,000				6.238,310,000	
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi perkantoran	lembar	1200	5,400,000	APBD Kabupaten		1200	5,400,000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meningkat								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Pelayanan administrasi	bulan	12 Bin	330,000,000	APBD Kabupaten		12 Bin	335,000,000	
		Air dan Listrik	Pereliharaannya prasarana transportasi	%	100	55,000,000	APBD Kabupaten		100	58,000,000	
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pelayanan administrasi keuangan	%	100	120,000,000	APBD Kabupaten		100	125,000,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pelaksanaan perkantoran	%	100	12,500,000	APBD Kabupaten		100	13,000,000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pelaksanaan perkantoran	%	100	50,000,000	APBD Kabupaten		100	55,000,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelaksanaan administrasi	%	100	33,150,000	APBD Kabupaten		100	34,150,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan administrasi	%	100	5,000,000	APBD Kabupaten		100	5,500,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelayanan administrasi	orang	100	7,000,000	APBD Kabupaten		100	7,500,000	
		Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelayanan administrasi	paket	60	6,000,000	APBD Kabupaten		100	6,500,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Perjalanan perkantoran	paket	1	240,000,000	APBD Kabupaten		1	250,000,000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah terlaksana	paket	1		APBD Kabupaten				
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		unit	1	1,127,560,000	APBD Kabupaten		0	1,150,260,000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya kegiatan operasional	unit	20	103,560,000	APBD Kabupaten		20	105,260,000	
		Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	unit	20		APBD Kabupaten		20		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana	8		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor tersedia	unit	6	64,000,000	APBD Kabupaten		3	45,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik	unit	25	360,000,000	APBD Kabupaten		15	360,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sarana transportasi terpelihara	unit	25	500,000,000	APBD Kabupaten		31	550,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung Kantor	Sarana transportasi terpelihara	unit	25	80,000,000	APBD Kabupaten		30	90,000,000	
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				130,000,000			132	132,000,000	
	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya	Disiplin Pegawai	orang	132	130,000,000	APBD Kabupaten		132	132,000,000	
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Disiplin Pegawai	orang	2 Orang	60,000,000	APBD Kabupaten		2 orang	60,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal				120,000,000			100 Buku	125,000,000	
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Kegiatan Laporan Operasional Dinas Perhubungan Terlaksana	buku	100 Buku	120,000,000	APBD Kabupaten		100 Buku	125,000,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				395,000,000			2 Dok	250,000,000	
05	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prasarana dan fasilitas perhubungan			295,000,000	APBD Kabupaten		2 Dok	150,000,000	
	Pencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana	dokumen	6 Dok				1 Dok	100,000,000	
	Penyusunan kebijakan,norma,standar dan prosedur bidang perhubungan	dokumen kebijakan,norma,standar dan prosedur kebijakan	dokumen	1 Dok	100,000,000	APBD Kabupaten		1 Dok	100,000,000	
06	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJSDP	Prasarana dan fasilitas LLAJSDP	Unit	13 Unit	400,000,000	APBD Kabupaten		13	450,000,000	
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terminal/Pelabuhan mantap baik	Unit	13 Unit	400,000,000	APBD Kabupaten		13	450,000,000	

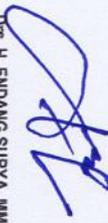
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2018						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
07	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kenyamanan masyarakat berlalu lintas	Dokumen	2 Dok	780,000,000	APBD Kabupaten		2	2,026,000,000	
	Kegiatan pencapaian keamanan dan kenyamanan penumpang dilindungi terminal dan parkir	Terselenggaranya pencapaian keamanan dan kenyamanan penumpang dilindungi terminal								
	Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	Terawasi kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	lokasi	2 Lok	298,000,000	APBD Kabupaten		2	306,000,000	
	Sosialisasi penyuluhan lalu lintas angkutan sungai	Peningkatan pengetahuan lalu lintas angkutan sungai	Lokasi	-	-	APBD Kabupaten		1	85,000,000	
	Forum lalu lintas angkutan jalan	rapat-rapat pembahasaan forum LLAU	kali	4 Kali	250,000,000	APBD Kabupaten		4 Kali	250,000,000	
	Kegiatan Posko pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	Terselenggaranya pelayanan posko/ramadhan, dan	kegiatan	8 Keg	180,000,000	APBD Kabupaten		8 keg	200,000,000	
	Kegiatan pencapaian keamanan dan kenyamanan penumpang dilindungi pelabuhan sungai dan penyeberangan	Terselenggaranya pencapaian keamanan dan kenyamanan penumpang dilindungi terminal	bulan	2 Bin	260,000,000	APBD Kabupaten		2 Bin	265,000,000	
	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi awak/ kendaraan angkutan umum/tafelen	terpilih sopir/juru mudi awak/ kendaraan angkutan umum/tafelen	Orang	1	45,000,000	-		1	45,000,000	
	Sosialisasi penyuluhan lalu lintas angkutan darat	Peningkatan pengetahuan lalu lintas angkutan darat	Lokasi	3	80,000,000			3	85,000,000	
19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas			4,010,000,000				1,030,000,000	
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Darat	tersedianya rambu lalu			250,000,000	APBD Kabupaten			260,000,000	
		- Rambu	unit	30	-	APBD Kabupaten		30		
		- RPPJ	unit	7	-	APBD Kabupaten		7		
		- guardrail	meter	150	-	APBD Kabupaten		150		
	Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas		12	760,000,000	APBD Kabupaten		12	770,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2018				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
08	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	kelangkaan kendaraan bermotor		5	1,810,000,000				120,000,000	
	Pengadaan Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedia alat pengujian kendaraan bermotor	unit	4	1,700,000,000			-		
	Uji kelangkaan pengoperasian kendaraan bermotor	- uji kelangkaan kendaraan bermotor - cetak buku uji - cetak plat uji pemeng - cetak stiker samping	unit buku pasang pasang	2200 Buku 2200 Pasang 2200 Pasang	110,000,000	APBD Kabupaten		2300 2300 2300	120,000,000	
TOTAL					7,809,610,000				6,238,310,000	

Kuala Tungkal,

2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. H. ENDANG SURYA, MM

Pembina Utama muda
NIP. 19650619 198612 1 001

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
SUMBER DANA APBN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

A. Usulan Kegiatan Peningkatan Dermaga ASDP, Halte Sungai dan Kelengkapan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan di Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019		
NO	URAIAN	JUMLAH UNIT
1	Peningkatan Dermaga ASDP di Kuala Tungkal.	1 Unit
2	Perencanaan Pembangunan Halte Sungai di Dusun Kelagian Lama Desa Kelagian Kecamatan Tebing Tinggi.	1 Unit
3	Perencanaan Pembangunan Halte Sungai di Dusun Teluk Pengkah di Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi.	1 Unit
4	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai di Desa Parit Pudir Kecamatan Pengabuan.	1 Unit
5	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai Kelurahan Betara Kiri Kecamatan Kuala Betara.	1 Unit
6	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai di Kelurahan Tungkal V Kecamatan Seberang Kota.	1 Unit
7	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai Parit H. Yakub Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara.	1 Unit
8	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai Pasar Senin Desa Makmur Jaya Kecamatan Betara .	1 Unit
9	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai Desa Sungai Pampang Kecamatan Pengabuan.	1 Unit
10	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai di Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan.	1 Unit
11	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai di Desa Sungai Jering Kecamatan Pengabuan.	1 Unit
12	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai di Desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan.	1 Unit
13	Jembatan Timbang di Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.	1 Unit
14	Daprah (Protechor/Pelindung Ponton) Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.	1 Unit
B. MOHON USULAN BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN		
NO	URAIAN	JUMLAH UNIT
1	Jalan Nasional dari Perbatasan Tanjung Jabung Barat - Tanjung Jabung Timur sampai ke simpang 3 BGP Pematang Lumut (data dukung terlampir).	323 Unit
2	Jalan Provinsi dari Simpang 3 Bram Itam sampai ke Kantor Camat Pengabuan Teluk Nilau (data dukung terlampir).	76 Unit
3	Jalan Provinsi dari Simpang 3 Parit Semau sampai ke Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal (data dukung terlampir).	-
4	Jalan Kabupaten dalam Kota Kuala Tungkal (data dukung terlampir).	132 Unit
5	Jalan menuju Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal (data dukung terlampir).	83 Unit
6	Kawasan dalam Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal (data dukung terlampir).	55 Unit
7	Guardrail / Pagar Pengamanan Jalan (data dukung terlampir).	
8	Paku Jalan (data dukung terlampir).	
9	Lampu Traffic Light sebanyak 2 (dua) Unit di Jalan Sriwijaya (simpang polwan) dan Jalan Siswa (simpang GOR).	2 Unit

BAB IV KESIMPULAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan berdasarkan Renstra digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan. Renja Tahun 2019 ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Renstra.

Penyusunan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta peran aktif stakeholder terkait.

Kuala Tungkal, 2018

Penanggung Jawab
Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650619 198512 1 001